

Kerjasama antara



Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia



Program Studi Ilmu Komunikasi

E-ISSN:  
2962-4169  
Volume 4  
Nomor 1  
Juni 2025

**KONTEKSTUAL**  
Jurnal Ilmu Komunikasi  
[www.ubl.ac.id/kontekstual](http://www.ubl.ac.id/kontekstual)

## **Etika Narasi Komunikasi Politik Berlandaskan Ideologi Pancasila**

### **Ethics of Political Communication Narrative Based on Pancasila Ideology**

M. Ibnu Naufal Maskuri

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

\*Penulis korespondensi: Telpon. +62-81246602990; e-mail: [m.ibnunaufal@gmail.com](mailto:m.ibnunaufal@gmail.com)

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji etika narasi komunikasi politik yang berlandaskan ideologi Pancasila dalam konteks kehidupan politik di Indonesia. Pancasila, sebagai dasar negara, memiliki nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman dalam membangun narasi komunikasi politik yang demokratis, inklusif, dan mengedepankan keadilan sosial. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis terhadap penerapan setiap sila dalam Pancasila dalam praktik komunikasi politik yang bertujuan untuk membentuk persepsi publik yang positif, mengurangi polarisasi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan library research, yang mengandalkan studi pustaka, dokumen, serta berbagai referensi terkait dengan teori komunikasi politik dan ideologi Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi politik yang beretika harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti menghormati keberagaman, menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat, serta memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi etika narasi komunikasi politik berlandaskan Pancasila dapat memperkuat persatuan bangsa, meningkatkan kualitas demokrasi, dan mendorong tercapainya kesejahteraan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa setiap aktor politik, baik politisi, media, maupun masyarakat, memiliki tanggung jawab besar dalam membangun narasi yang berlandaskan Pancasila untuk menciptakan komunikasi politik yang lebih beretika. Penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam narasi politik dapat mengurangi ketegangan sosial dan mendorong tercapainya tujuan bersama, yaitu mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bersatu.

**Kata Kunci:** Etika, Narasi, Komunikasi Politik, Ideologi Pancasila.

#### **Abstract**

This study aims to examine the ethics of political communication narratives based on the Pancasila ideology in the context of political life in Indonesia. Pancasila, as the foundation of the state, has values that can be used as guidelines in building a democratic, inclusive, and social justice-oriented political communication narrative. In this study, an analysis was conducted on the application of each principle in Pancasila in political communication practices that aim to form positive public perceptions, reduce polarization, and increase community participation in the political process. The research method

used is qualitative research with a library research approach, which relies on literature studies, documents, and various references related to political communication theory and the Pancasila ideology. The results of the study indicate that ethical political communication must reflect the values of Pancasila, such as respecting diversity, upholding deliberation and consensus, and fighting for social justice for all Indonesian people. The implementation of the ethics of political communication narratives based on Pancasila can strengthen national unity, improve the quality of democracy, and encourage the achievement of social welfare. This study concludes that every political actor, be it politicians, media, or society, has a great responsibility in building a narrative based on Pancasila to create more ethical political communication. The application of Pancasila principles in political narratives can reduce social tensions and encourage the achievement of common goals, namely realizing a just, prosperous, and united Indonesia.

**Keywords:** *Ethics, Narrative, Political Communication, Pancasila Ideology.*

## PENDAHULUAN

Komunikasi politik memiliki peranan yang sangat vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di negara dengan keberagaman budaya, agama, dan suku seperti Indonesia. (T. P. Pureklolon, 2016). Di Indonesia, yang mengadopsi Pancasila sebagai dasar negara, narasi komunikasi politik seharusnya selalu berpedoman pada nilai-nilai mulia yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum, tetapi juga sebagai pedoman moral dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam komunikasi politik (T. T. Pureklolon, 2020). Namun, dalam penerapannya, narasi komunikasi politik sering menghadapi berbagai tantangan kompleks, seperti munculnya polarisasi, penyebaran hoaks, serta perbedaan penafsiran terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. (Zuhdi, 2020a). Oleh karena itu, penting untuk memahami etika narasi komunikasi politik yang sesuai dengan ideologi Pancasila.

Indonesia sebagai negara yang mengusung sistem demokrasi, memerlukan komunikasi politik yang mampu menjaga kestabilan sosial dan menghindari ketegangan antar kelompok yang berbeda (Badrun, 2022). Dengan populasi yang sangat beragam, komunikasi politik sering kali menjadi sarana untuk merangkul atau bahkan memecah belah berbagai kelompok tersebut. Terkadang, narasi komunikasi politik yang digunakan oleh aktor-aktor politik tidak sesuai dengan semangat Pancasila, seperti menonjolkan perbedaan yang ada daripada mempererat persatuan (Shahreza, 2018). Oleh karena itu, penelitian mengenai etika komunikasi politik yang berlandaskan Pancasila sangat penting untuk menilai sejauh mana nilai-nilai Pancasila tercermin dalam narasi yang dibangun oleh aktor politik.

Secara historis, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia lahir dari hasil musyawarah yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat Indonesia pada masa awal kemerdekaan (Mahardika, 2018). Salah satu tujuan utamanya adalah untuk menciptakan keadilan sosial dan kesatuan bangsa. Namun, implementasi dari nilai-nilai Pancasila sering kali terhambat oleh dinamika politik yang berkembang, seperti perbedaan kepentingan antar partai politik, kelompok masyarakat, atau bahkan individu (Mali & Fransiskus, 2024). Dalam komunikasi politik, seringkali terdapat perbedaan antara apa yang seharusnya disampaikan dan kenyataan di lapangan, di mana narasi yang dibangun lebih sering memprioritaskan kepentingan kelompok tertentu daripada kepentingan bangsa secara keseluruhan.

Komunikasi politik yang tidak beretika, misalnya dengan menyebarkan informasi yang menyesatkan atau memperuncing perbedaan, jelas bertentangan dengan prinsip Pancasila, yang mengutamakan musyawarah dan mufakat. Polarisasi politik yang terjadi dalam masyarakat Indonesia sering kali disebabkan oleh penggunaan narasi politik yang mengedepankan perbedaan, ketegangan, dan saling serang antar pihak (Heryanto, 2020). Pada titik ini, Pancasila sebagai ideologi yang menekankan persatuan dan kerukunan, menjadi landasan yang sangat relevan untuk menata ulang pola komunikasi politik di Indonesia.

Selain itu, etika narasi komunikasi politik juga menjadi isu yang semakin kompleks dengan berkembangnya teknologi informasi. Sifat penyebaran informasi yang sangat cepat melalui media sosial menyebabkan kebenaran dan kebohongan seringkali tercampur, sehingga memengaruhi cara pandang masyarakat. Hoaks dan berita bohong semakin sering ditemukan, terutama dalam situasi politik yang penuh dengan ketegangan (Suharyanto, 2019). Dalam konteks ini, ideologi Pancasila yang mengedepankan kejujuran dan keadilan sosial harus dijadikan pedoman untuk memastikan bahwa komunikasi politik yang terjadi dapat memajukan kepentingan umum, bukan hanya kepentingan segelintir pihak.

Di sisi lain, banyak pihak yang berpendapat bahwa Pancasila sudah tidak relevan lagi sebagai landasan komunikasi politik. Pandangan ini muncul karena adanya kecenderungan untuk mengedepankan nilai-nilai pragmatis yang dianggap lebih sesuai dengan situasi politik kontemporer (Noor, 2016). Namun sebenarnya, Pancasila tetap relevan karena nilai-nilai universalnya, seperti keadilan, persatuan, dan kemanusiaan, merupakan nilai yang tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia (Zuchron, 2021). Karena itu, sangat penting untuk menggali lebih dalam bagaimana narasi komunikasi politik di Indonesia seharusnya berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila, sehingga komunikasi tersebut dapat menghasilkan situasi politik yang sehat dan kondusif.

Tantangan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana cara mengidentifikasi dan menganalisis narasi-narasi komunikasi politik yang mengandung elemen-elemen etika serta kesesuaian dengan Pancasila. Narasi komunikasi politik yang bertanggung jawab harus mampu menghindari penyebaran kebencian, diskriminasi, atau penghasutan yang dapat merusak persatuan bangsa (Umar, 2021). Di sisi lain, komunikasi politik juga harus bisa menciptakan ruang bagi dialog dan musyawarah yang menghargai perbedaan dan berorientasi pada solusi yang adil bagi seluruh masyarakat.

Perlu juga diperhatikan bahwa etika dalam narasi komunikasi politik tidak hanya berlaku pada komunikasi yang dilakukan oleh politisi, tetapi juga melibatkan media massa sebagai agen penyebar informasi. Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena media sosial telah merubah lanskap komunikasi politik, di mana setiap orang kini memiliki akses untuk menyebarkan informasi (Khatimah et al., 2024). Hal ini mengharuskan adanya kehati-hatian dalam menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi politik. Apakah narasi yang disampaikan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Ataukah malah memperburuk keadaan dengan menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang perlu dijawab dalam penelitian ini.

Selain itu, perlu dilakukan kajian mengenai peran lembaga-lembaga negara, seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers, dalam memastikan etika komunikasi politik tetap terjaga di media massa. Lembaga-lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi komunikasi politik yang terjadi, terutama di media massa dan media

sosial (Al Azis, 2021). Melalui pengawasan yang ketat, mereka dapat memastikan bahwa narasi komunikasi politik yang berkembang di masyarakat tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila.

Seiring dengan perkembangan demokrasi yang semakin dinamis, peran komunikasi politik juga semakin kompleks. Oleh karena itu, penelitian mengenai etika narasi komunikasi politik yang berlandaskan Pancasila akan memberikan kontribusi penting bagi pengembangan sistem politik Indonesia yang lebih sehat dan inklusif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi para aktor politik, media, dan masyarakat untuk berkomunikasi dengan etika dan tanggung jawab, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pada akhirnya, penting untuk menyadari bahwa narasi komunikasi politik bukan hanya alat untuk memenangkan kontestasi politik, tetapi juga sarana untuk membangun kesadaran kolektif yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam konteks inilah, penelitian ini mencoba menggali lebih dalam tentang bagaimana etika narasi komunikasi politik yang berlandaskan ideologi Pancasila dapat menciptakan situasi politik yang lebih inklusif, adil, dan beradab bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada pengumpulan dan analisis sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian (Mahanum, 2021). Dalam konteks ini, penelitian akan menggali literatur-literatur yang berkaitan dengan etika komunikasi politik, ideologi Pancasila, serta hubungan antara keduanya. Berbagai buku, artikel ilmiah, jurnal, dokumen negara, dan laporan penelitian yang membahas komunikasi politik, prinsip etika dalam politik, serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila akan dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana narasi komunikasi politik di Indonesia seharusnya dibentuk berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Melalui *library research*, peneliti akan melakukan kajian terhadap teori-teori komunikasi politik dan etika dalam komunikasi, serta mendalami interpretasi ideologi Pancasila dalam konteks komunikasi politik di Indonesia. Penelitian ini juga akan membandingkan berbagai pandangan mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam komunikasi politik serta mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat mengenai bagaimana etika narasi komunikasi politik dapat dijaga dan disesuaikan dengan ideologi Pancasila di tengah dinamika politik Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Komunikasi Politik**

Komunikasi politik merupakan proses penyebaran informasi, pesan, dan gagasan yang berkaitan dengan politik antara para aktor politik, media, dan masyarakat (Muslimin, 2019). Tujuan utama komunikasi politik adalah untuk membentuk opini publik, memengaruhi perilaku politik, serta memperkuat atau mengubah sikap dan pandangan politik masyarakat (Sarihati et al., 2022). Dalam komunikasi politik, informasi disampaikan melalui berbagai saluran, seperti media massa, media sosial, pidato politik, atau debat publik, untuk mencapai efek yang diinginkan oleh aktor politik, seperti memenangkan pemilu atau mendukung kebijakan tertentu (Heryanto, 2018).

Berbagai teori dalam komunikasi politik membantu untuk memahami bagaimana pesan-pesan politik disampaikan dan diterima. Teori agenda setting, misalnya, menunjukkan bagaimana media dapat mempengaruhi agenda politik dengan menentukan isu-isu apa yang akan dibicarakan dan diprioritaskan oleh publik (Ardila et al., 2024). Media memiliki peran penting dalam memberi fokus pada masalah-masalah tertentu, yang kemudian mempengaruhi persepsi publik terhadap isu-isu tersebut. Selain itu, teori spiral keheningan menjelaskan bahwa individu yang merasa pendapatnya berbeda dari mayoritas cenderung memilih untuk diam, karena takut mendapat isolasi sosial. Ini menciptakan kesan bahwa opini mayoritas lebih dominan daripada yang sebenarnya (Hadi et al., 2020).

Teori lain yang relevan dalam komunikasi politik adalah teori framing, yang berfokus pada cara media dan aktor politik membingkai isu tertentu untuk mempengaruhi cara publik memahami masalah tersebut (Widyaya & Setiawan, 2023). Framing dapat merujuk pada cara-cara tertentu dalam penyajian informasi, yang dapat menekankan aspek positif atau negatif dari sebuah isu. Misalnya, media dapat memilih untuk menggambarkan kebijakan pemerintah sebagai "langkah besar menuju kemajuan" atau sebagai "kebijakan kontroversial yang menambah ketidakadilan," yang akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Teori-teori ini membantu menjelaskan dinamika dalam komunikasi politik yang terjadi antara media, politisi, dan publik.

### **Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia**

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah dasar filosofi yang menyatukan bangsa Indonesia dalam keberagaman, mencakup agama, suku, budaya, serta pandangan hidup (Zuchron, 2021). Pancasila tidak hanya berperan sebagai panduan moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga sebagai landasan dalam sistem pemerintahan, hukum, serta interaksi sosial. Kelima sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai mulia yang menekankan pentingnya persatuan, keadilan sosial, demokrasi, serta penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan (Novitasari et al., 2023). Dalam konteks ini, Pancasila bertujuan untuk membangun tatanan kehidupan yang harmonis dan adil, menyelesaikan perbedaan yang ada di masyarakat, serta menempatkan kepentingan bersama sebagai prioritas utama.

Sebagai dasar ideologi negara, Pancasila juga berperan sebagai alat pemersatu bagi bangsa Indonesia yang kaya akan keberagaman (Pattipeilohy & Saingo, 2023). Dalam sejarahnya, Pancasila dirancang sebagai solusi untuk mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan budaya (Husna & Najicha, 2023). Dengan menekankan sila pertama yang mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa, sila kedua yang menghormati kemanusiaan, serta sila ketiga yang mengedepankan persatuan, Pancasila menjadi dasar yang penting dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di Indonesia. Ideologi ini mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dengan kepentingan bersama sebagai bangsa.

Pancasila juga mencerminkan demokrasi yang berpihak pada rakyat, di mana setiap kebijakan yang diambil harus berlandaskan pada prinsip musyawarah untuk mufakat dan mengutamakan kesejahteraan sosial. Sila kelima Pancasila yang berbunyi Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menekankan pentingnya pemerataan ekonomi dan keadilan dalam pembagian kekayaan. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai dasar ideologi dalam kehidupan bernegara, tetapi juga sebagai pedoman dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, yang menjaga harmoni antarindividu dan kelompok dalam kerangka kebangsaan (Trisno et al., 2024).

## **Narasi Komunikasi Politik Dalam Konteks Pancasila**

Dalam kerangka ideologi Pancasila, narasi komunikasi politik seharusnya menonjolkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebagai dasar moral dan etika dalam berkomunikasi. Nilai-nilai tersebut meliputi penghargaan terhadap kemanusiaan, persatuan, demokrasi, keadilan sosial, serta kesejahteraan bersama. Namun, dalam praktiknya, komunikasi politik di Indonesia sering kali menghadapi tantangan untuk tetap konsisten dengan prinsip-prinsip tersebut (Sofiyana et al., 2021). Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menyeimbangkan kepentingan politik individu atau kelompok dengan kepentingan kolektif bangsa. Dalam beberapa kasus, narasi politik lebih mengedepankan kepentingan jangka pendek atau golongan tertentu, yang berpotensi menimbulkan ketegangan sosial dan konflik, terutama dalam masyarakat yang pluralistik seperti Indonesia (Rahman, 2020).

Ketidaksesuaian narasi komunikasi politik dengan nilai-nilai Pancasila terlihat jelas dalam praktik politik yang sering kali mengedepankan retorika yang bersifat provokatif dan memecah belah. Polarisasi politik yang terjadi di ruang publik, baik melalui media sosial maupun kampanye politik, seringkali lebih mengarah pada eskalasi perbedaan daripada menjembatani persatuan (Nurhaidah, n.d.). Hal ini bertentangan dengan sila ketiga Pancasila, "Persatuan Indonesia," yang mengharuskan komunikasi politik untuk memperkuat rasa kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi narasi politik yang berkembang untuk mengedepankan nilai musyawarah dan mufakat, sesuai dengan Sila keempat Pancasila yang menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan politik.

### **Etika Narasi Komunikasi Politik Berlandaskan Ideologi Pancasila**

Etika dalam komunikasi politik memiliki peran penting untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan tidak hanya efektif dalam mencapai tujuan politik, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip moral dan sosial yang lebih umum. Dalam hal ini, etika komunikasi politik yang berdasarkan Pancasila mengharuskan adanya kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Politisi, sebagai aktor utama dalam komunikasi politik, harus mempertimbangkan dampak dari setiap narasi yang mereka bangun, terutama dalam menyampaikan informasi kepada publik (Putra, 2019). Kejujuran dalam menyampaikan fakta dan data yang akurat sangat penting untuk menghindari penyebaran informasi yang menyesatkan, seperti hoaks dan berita palsu, yang dapat merusak tatanan sosial dan demokrasi.

Selain itu, komunikasi politik yang beretika harus menghindari segala bentuk ujaran kebencian dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Komunikasi yang inklusif, yang menghargai perbedaan agama, suku, ras, dan pandangan politik, lebih sesuai dengan nilai Pancasila yang mengutamakan penghargaan terhadap kemanusiaan dan keragaman (Chang & Cap, 2018). Dalam hal ini, prinsip sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," harus tercermin dalam setiap narasi yang disampaikan oleh aktor politik. Etika dalam komunikasi politik juga menuntut agar narasi yang dibangun memperhatikan keberlanjutan jangka panjang, dengan tidak hanya mengejar tujuan jangka pendek yang merugikan kelompok atau pihak lain, tetapi juga berfokus pada kepentingan bersama dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

#### **a. Etika Narasi Komunikasi Politik Berlandaskan Ideologi Pancasila: Sila Pertama**

Sila pertama Pancasila, yaitu "Ketuhanan yang Maha Esa," memiliki peran fundamental dalam membentuk etika narasi komunikasi politik di Indonesia. Sila ini menegaskan pentingnya penghargaan terhadap keberagaman keyakinan dan kebebasan beragama dalam masyarakat Indonesia yang plural. Dalam konteks komunikasi politik, prinsip ini menuntut narasi yang mengedepankan nilai-nilai religius yang bersifat inklusif, menghormati semua pemeluk agama, dan menghindari diskriminasi atau penyalahgunaan agama dalam politik. Oleh karena itu, narasi komunikasi politik yang berlandaskan sila pertama harus dapat menciptakan ruang bagi dialog yang membangun, tanpa ada upaya untuk memanfaatkan agama demi kepentingan politik.

Salah satu aspek etika utama yang terkandung dalam sila pertama adalah penghormatan terhadap kebebasan beragama (Ohoiwutun, 2018). Dalam narasi komunikasi politik, ini berarti bahwa aktor politik harus memastikan bahwa pesan yang disampaikan tidak mengandung unsur yang dapat merendahkan atau mendiskreditkan agama atau keyakinan tertentu. Kampanye politik yang berbasis agama, misalnya, harus mengedepankan prinsip saling menghormati dan toleransi antar umat beragama, tanpa memanfaatkan sentimen keagamaan untuk memenangkan dukungan politik (Asrori, 2017). Dalam hal ini, komunikasi politik yang beretika harus senantiasa menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan penghormatan terhadap keyakinan orang lain.

Selanjutnya, dalam penerapan etika komunikasi politik berlandaskan sila pertama, penting bagi politisi dan media untuk menghindari narasi yang mengandung ujaran kebencian berbasis agama (Luthfi, 2018). Seringkali, dalam situasi politik yang tegang, beberapa pihak mencoba memanfaatkan perbedaan agama untuk membangun polarisasi sosial (Kuswandro, 2023). Hal ini dapat menciptakan ketegangan yang merusak persatuan bangsa, yang jelas bertentangan dengan nilai Pancasila. Oleh karena itu, narasi yang dibangun harus menekankan pada persatuan dalam perbedaan, serta menghargai hak setiap individu untuk memeluk agama dan keyakinannya tanpa adanya intimidasi atau diskriminasi.

Penting juga untuk dicatat bahwa sila pertama menuntut adanya pemahaman yang mendalam tentang spiritualitas yang meresapi kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai bagian dari etika komunikasi politik, narasi yang dibangun tidak hanya harus mengedepankan toleransi, tetapi juga harus menyentuh dimensi kemanusiaan yang lebih dalam. Dengan kata lain, narasi komunikasi politik harus mampu menyentuh nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal, yang berakar pada ajaran agama masing-masing, namun disampaikan dengan cara yang dapat diterima oleh semua pihak, tanpa memperburuk polarisasi.

Etika narasi komunikasi politik yang berlandaskan sila pertama Pancasila juga memerlukan keterlibatan aktif media dalam menjaga pesan-pesan yang disampaikan. Media memainkan peran penting dalam mendidik masyarakat tentang pentingnya menjaga etika dalam berkomunikasi politik, terutama yang berkaitan dengan isu-isu keagamaan (Trisiana et al., 2023). Sebagai contoh, media harus bertanggung jawab dalam menyaring dan menyebarkan informasi yang tidak mengandung unsur provokatif atau yang dapat menyinggung perasaan agama atau kelompok tertentu. Dalam hal ini, media memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan mendukung terciptanya masyarakat yang damai dan harmonis.

Dalam prakteknya, tantangan terbesar dalam penerapan etika komunikasi politik berdasarkan sila pertama adalah munculnya ekstremisme atau radikalisme yang menggunakan agama sebagai alat politik. Ada beberapa pihak yang dengan sengaja menggunakan agama untuk membangun kekuatan politik dengan cara-cara yang tidak beretika, seperti menyebarkan kebencian, fitnah, atau bahkan menghasut kekerasan atas nama agama (Umar, 2021). Tentu saja, hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan kedamaian, persatuan, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, penting bagi setiap aktor politik untuk menjaga agar narasi komunikasi politik yang mereka sampaikan tetap berfokus pada prinsip-prinsip luhur yang terkandung dalam sila pertama, dan tidak terjebak dalam politik identitas yang memecah belah.

Terakhir, meskipun tantangan dalam menerapkan etika komunikasi politik berlandaskan sila pertama Pancasila sangat besar, peluang untuk menciptakan komunikasi politik yang damai dan berbasis pada nilai kebersamaan masih sangat terbuka. Untuk itu, pendidikan politik yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila perlu diperkuat, agar masyarakat dapat lebih memahami pentingnya komunikasi yang mengedepankan rasa saling menghormati. Dalam konteks ini, politisi dan tokoh agama juga harus memainkan peran penting dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya memelihara keharmonisan sosial, dengan menjunjung tinggi prinsip "Ketuhanan yang Maha Esa" dalam setiap narasi yang dibangun. Dengan demikian, etika komunikasi politik yang berlandaskan sila pertama Pancasila dapat menciptakan ruang bagi masyarakat yang lebih adil, damai, dan bersatu.

#### **b. Etika Narasi Komunikasi Politik Berlandaskan Ideologi Pancasila: Sila kedua**

Sila kedua Pancasila, yaitu "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," mengandung makna yang sangat penting dalam membentuk etika narasi komunikasi politik di Indonesia. Sila ini mengharuskan setiap narasi komunikasi politik yang disampaikan oleh aktor politik, media, dan masyarakat untuk mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang mengutamakan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta menghindari diskriminasi (Suarlin & Fatmawati, 2022). Dalam konteks komunikasi politik, narasi yang berlandaskan sila kedua harus memastikan bahwa setiap individu dihargai dan diperlakukan dengan adil tanpa adanya ketidakadilan sosial, diskriminasi rasial, atau penindasan berdasarkan status sosial.

Narasi komunikasi politik yang beretika, sesuai dengan sila kedua Pancasila, memprioritaskan hak asasi manusia dalam setiap pesan yang disampaikan. Hal ini berarti bahwa setiap kampanye politik atau pernyataan publik dari para politisi harus menjaga integritas dan martabat individu. Tidak boleh ada ruang untuk narasi yang merendahkan kelompok tertentu atau menstigma individu berdasarkan latar belakang, agama, etnis, atau orientasi politik. Keberagaman harus diterima dan dihargai dalam narasi politik yang dibangun, serta dijadikan sebagai kekuatan untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis (Rasyid et al., 2024). Oleh karena itu, komunikasi politik harus menghindari ujaran kebencian, fitnah, dan segala bentuk pemecahan belah yang dapat merusak keharmonisan sosial.

Selain itu, sila kedua menekankan pentingnya keadilan sosial. Dalam narasi komunikasi politik, hal ini berarti bahwa setiap kebijakan atau keputusan politik yang diambil harus berfokus pada pemerataan hak, akses, dan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Etika dalam komunikasi politik yang berlandaskan sila kedua

Pancasila harus dapat mengedepankan prinsip keadilan dalam pembagian sumber daya, peluang kerja, pendidikan, dan fasilitas publik (Iswardhana, 2020). Kampanye politik yang mengedepankan keadilan sosial akan memperhatikan kebutuhan dan hak-hak kelompok yang paling terpinggirkan, seperti masyarakat miskin, perempuan, anak-anak, dan kelompok difabel. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun golongan yang merasa terabaikan atau ditindas dalam proses politik.

Penerapan etika komunikasi politik yang berlandaskan sila kedua juga membutuhkan kesadaran akan pentingnya proses demokrasi yang berkeadilan. Setiap narasi politik yang dibangun harus memberikan ruang yang cukup bagi setiap individu atau kelompok untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan yang terkandung dalam sila kedua, yang mengharuskan agar tidak ada diskriminasi dalam pemberian hak politik, baik dalam pemilihan umum, pengambilan keputusan publik, maupun dalam kebebasan berbicara dan berkumpul (Harefa & Fatolosa Hulu, 2020). Narasi politik yang mengedepankan etika ini akan mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dalam sistem pemerintahan.

Namun, meskipun sila kedua menuntut penerapan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, tantangan dalam implementasinya sangat besar. Politik identitas, misalnya, dapat mengarah pada ketidakadilan sosial jika tidak dikelola dengan bijaksana. Beberapa narasi komunikasi politik dapat memperburuk ketegangan sosial dengan menciptakan sekat-sekat identitas yang memisahkan kelompok satu dengan kelompok lainnya (Fautanu, 2025). Karena itu, sangat penting bagi setiap aktor politik untuk mengutamakan nilai-nilai persatuan dan keharmonisan, serta menghindari politik yang bersifat eksklusif atau memperburuk perbedaan.

Dalam konteks media massa, etika narasi komunikasi politik yang berlandaskan sila kedua juga memerlukan keterlibatan aktif untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak menambah ketidakadilan atau ketimpangan sosial. Media memiliki tanggung jawab moral untuk menyajikan berita dan narasi yang objektif, adil, dan menghindari penyebaran informasi yang dapat menimbulkan kecemasan, kebencian, atau ketidakadilan terhadap kelompok tertentu (Taufik & Suryana, 2022). Penyiaran informasi yang adil dan berimbang akan membantu menciptakan iklim politik yang sehat, di mana setiap pihak merasa didengar dan dihargai (Hikmat, 2020).

Penerapan etika komunikasi politik yang berlandaskan sila kedua juga mengharuskan politisi dan pembuat kebijakan untuk memiliki empati terhadap masyarakat yang termarginalkan atau kurang beruntung. Mereka harus mampu menyampaikan pesan politik yang tidak hanya menguntungkan kelompok mayoritas, tetapi juga memberi perhatian pada kelompok minoritas atau yang terdampak kebijakan yang tidak adil. Dalam hal ini, komunikasi politik yang beretika seharusnya mendorong dialog dan keterlibatan sosial yang memperhatikan kesejahteraan dan hak-hak semua anggota masyarakat, tanpa kecuali. Dengan demikian, sila kedua Pancasila akan terwujud dalam praktik komunikasi politik yang adil, manusiawi, dan menghargai setiap individu.

### **c. Etika Narasi Komunikasi Politik Berlandaskan Ideologi Pancasila: Sila ketiga**

Sila ketiga Pancasila, yang berbunyi "Persatuan Indonesia," merupakan prinsip dasar yang menggarisbawahi pentingnya menjaga kesatuan dan keharmonisan di

tengah keragaman masyarakat Indonesia (Aulia & Julita, 2024). Dalam konteks etika narasi komunikasi politik, sila ketiga mengharuskan setiap narasi yang disampaikan untuk membangun dan memperkuat rasa persatuan antarindividu dan kelompok, tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras, atau pandangan politik. Oleh karena itu, narasi komunikasi politik yang beretika berlandaskan sila ketiga harus mengedepankan nilai-nilai inklusivitas dan toleransi, serta menghindari segala bentuk polarisasi yang dapat merusak keharmonisan sosial.

Dalam prakteknya, komunikasi politik yang berlandaskan sila ketiga Pancasila harus mampu meredakan ketegangan sosial dan menyatukan masyarakat yang beragam (Novanda et al., 2024). Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengedepankan pesan-pesan yang mengutamakan kebersamaan dan tujuan bersama, bukan sekadar kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Politisi dan aktor politik lainnya harus menyadari bahwa dalam negara yang pluralistik seperti Indonesia, narasi yang dibangun harus lebih menekankan pada persatuan, bukan perpecahan. Dalam hal ini, etika narasi komunikasi politik harus selalu berfokus pada membangun solidaritas antarwarga negara dan menghindari penyebaran retorika yang dapat memecah belah.

Sebagai landasan etika dalam komunikasi politik, prinsip ini mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam diskursus politik. Narasi yang dibangun oleh politisi atau media massa seharusnya tidak hanya berfokus pada memenangkan perdebatan atau menarik simpati berdasarkan kepentingan kelompok, tetapi harus mencerminkan upaya untuk mencari solusi terbaik bagi seluruh bangsa. Dalam hal ini, komunikasi politik yang beretika harus menekankan pada pentingnya dialog yang konstruktif dan saling mendengarkan, dengan tujuan akhir memperkuat persatuan dan kesejahteraan bersama.

Etika narasi komunikasi politik berlandaskan sila ketiga Pancasila juga berarti menghindari penggunaan politik identitas yang dapat memperburuk polarisasi di masyarakat. Di era digital seperti saat ini, narasi politik yang berbasis identitas seringkali digunakan untuk meraih simpati kelompok tertentu, meskipun dengan cara yang dapat membangkitkan perasaan kebencian terhadap kelompok lain (Kuswandoro, 2023). Oleh karena itu, penting bagi aktor politik dan media untuk menjaga narasi mereka agar tidak terjerumus dalam narasi yang mengarah pada ketegangan antar kelompok, baik itu berdasarkan agama, ras, etnis, atau pandangan politik. Komunikasi politik yang etis berlandaskan sila ketiga harus menjaga keseimbangan antara mengakui keberagaman dan menjaga kesatuan bangsa (Hidayat & Suwanto, 2020).

Selain itu, sila ketiga menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia. Narasi komunikasi politik yang beretika harus mampu menyoroti kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada, serta mendorong kebijakan yang dapat memperkuat kesetaraan dan keadilan sosial di seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, politisi dan pembuat kebijakan harus memastikan bahwa narasi yang mereka bangun tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga memperhatikan daerah-daerah yang terpinggirkan atau kurang berkembang. Etika komunikasi politik yang berlandaskan sila ketiga harus berkomitmen pada pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, demi mewujudkan persatuan yang sejati (Aryansyah & Fadhli, 2024).

Media massa juga memegang peranan penting dalam membentuk narasi komunikasi politik yang berlandaskan sila ketiga Pancasila. Sebagai agen utama dalam penyebaran informasi, media harus menjaga objektivitas dan tidak berpihak pada kepentingan kelompok tertentu yang dapat merusak persatuan bangsa (Aisyah et al., 2022). Etika narasi komunikasi politik di media harus mengutamakan keberagaman dan keberlanjutan dalam menyajikan informasi, dengan tujuan untuk memperkaya pemahaman masyarakat tentang isu-isu politik yang ada, bukan untuk memperburuk polarisasi sosial. Dengan demikian, media memiliki tanggung jawab besar untuk menyajikan narasi yang mendukung terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera, dan bersatu (Iskandar, 2018).

Dalam mengimplementasikan sila ketiga dalam komunikasi politik, tantangan utama yang dihadapi adalah mengatasi fenomena polarisasi yang semakin tajam dalam masyarakat. Polarisasi politik yang berlebihan dapat mengancam persatuan Indonesia, karena menciptakan sekat-sekat sosial yang mempersulit tercapainya konsensus nasional. Karena itu, sangat penting bagi pemimpin politik dan aktor publik untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap prinsip persatuan dengan senantiasa mengedepankan narasi yang mendorong penyelesaian masalah secara damai dan harmonis. Narasi politik yang beretika, yang berlandaskan sila ketiga, harus dapat menjadi jembatan bagi masyarakat untuk bersatu, meskipun dalam keragaman yang ada, demi kepentingan bersama sebagai bangsa Indonesia.

#### **d. Etika Narasi Komunikasi Politik Berlandaskan Ideologi Pancasila: Sila keempat**

Sila keempat Pancasila, berbunyi "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan" memiliki makna mendalam terkait dengan etika narasi komunikasi politik di Indonesia (Samosir et al., 2023). Sila ini menggarisbawahi pentingnya musyawarah untuk mufakat dan sistem perwakilan dalam pembuatan keputusan politik yang demokratis. Dalam konteks komunikasi politik, etika narasi yang berlandaskan sila keempat menuntut agar setiap narasi yang disampaikan oleh politisi atau media massa dapat mencerminkan prinsip-prinsip musyawarah, inklusivitas, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan (Bakry et al., 2024). Narasi yang dibangun harus mendorong keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam proses politik dan menghindari dominasi suara kelompok tertentu yang dapat mengabaikan kepentingan umum.

Sebagai salah satu pilar utama demokrasi, sila keempat juga mengajak setiap aktor politik untuk mengedepankan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam setiap narasi politik yang dibangun. Musyawarah untuk mufakat menuntut adanya saling mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain, serta mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak (Utari et al., 2023). Dalam hal ini, etika narasi komunikasi politik yang berlandaskan sila keempat harus mempromosikan pola komunikasi yang bersifat dialogis, bukan monologis. Politisi dan aktor politik harus berkomitmen untuk tidak hanya mendengarkan suara mayoritas, tetapi juga memberikan ruang bagi minoritas untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Selain itu, sila keempat menuntut adanya pemahaman yang mendalam tentang perwakilan dalam sistem politik Indonesia. Dalam konteks komunikasi politik, narasi

yang dibangun harus memastikan bahwa hak setiap individu atau kelompok untuk diwakili dalam sistem perwakilan dihargai dan dilindungi. Setiap individu, terlepas dari status sosial, agama, atau latar belakang politik, harus merasa bahwa suara mereka dihargai dalam proses pembuatan kebijakan (Tarigan, 2024). Oleh karena itu, narasi yang berlandaskan sila keempat harus mendorong komunikasi yang terbuka, transparan, dan responsif terhadap aspirasi rakyat, agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kehendak masyarakat secara keseluruhan.

Sila keempat juga menyoroti pentingnya kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan politik. Dalam hal ini, etika narasi komunikasi politik berlandaskan sila keempat harus mendorong politisi untuk tidak hanya mempertimbangkan keuntungan jangka pendek, tetapi juga memikirkan dampak jangka panjang dari keputusan yang diambil. Keputusan politik yang diambil dengan kebijaksanaan harus berfokus pada kesejahteraan seluruh rakyat, dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya (Putri et al., 2024). Narasi politik yang beretika harus mampu memberikan gambaran yang jelas dan transparan tentang dasar keputusan yang diambil, sehingga masyarakat dapat memahami alasan dan tujuan dari setiap kebijakan yang diterapkan (Wirata, 2024).

Salah satu tantangan utama dalam menerapkan sila keempat dalam komunikasi politik adalah adanya kecenderungan untuk mengedepankan kepentingan kelompok tertentu di atas kepentingan umum. Politisi atau partai politik yang hanya berfokus pada kepentingan kelompok atau golongan mereka sendiri cenderung menyampaikan narasi yang tidak inklusif, yang justru dapat memecah belah masyarakat. Karena itu, sangat penting bagi setiap aktor politik untuk menerapkan prinsip musyawarah dan mufakat, yang tidak hanya menguntungkan kelompok mayoritas atau pihak yang berkuasa, tetapi juga melibatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan politik yang adil dan berkeadilan.

Etika narasi komunikasi politik yang berlandaskan sila keempat juga mengharuskan politisi dan media massa untuk menjaga integritas serta tanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada publik. Dalam proses komunikasi politik, informasi yang disampaikan harus bersifat jujur, tidak menyesatkan, dan menghindari manipulasi yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Media massa, sebagai salah satu agen utama dalam penyebaran informasi, memiliki tanggung jawab besar untuk menyaring dan menyebarkan informasi yang dapat membangun pemahaman masyarakat tentang isu-isu politik secara adil dan objektif (Putra, 2019). Media harus berfungsi sebagai penghubung bagi masyarakat untuk memahami kebijakan yang diambil beserta alasan di balik keputusan tersebut, sehingga mendorong partisipasi yang lebih aktif dalam proses politik.

Akhirnya, penerapan etika komunikasi politik berlandaskan sila keempat Pancasila akan menghadapi tantangan dari politisasi isu-isu tertentu yang sering kali digunakan untuk memecah belah masyarakat. Dalam era digital, disinformasi dan narasi yang bersifat provokatif atau sensasional sering kali digunakan untuk memenangkan kontestasi politik, meskipun dengan mengorbankan prinsip musyawarah dan mufakat (Bulkhani et al., 2024). Oleh karena itu, penting bagi setiap aktor politik dan media untuk tetap mengedepankan nilai-nilai kebijaksanaan dan kesadaran sosial dalam setiap narasi yang dibangun. Narasi komunikasi politik yang beretika harus

mampu meredakan ketegangan politik dan sosial, dan lebih fokus pada upaya untuk mencari solusi yang membawa kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia.

**e. Etika Narasi Komunikasi Politik Berlandaskan Ideologi Pancasila: Sila kelima**

Sila kelima Pancasila, yang berbunyi "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," mengandung makna yang mendalam mengenai pentingnya pemerataan, kesetaraan, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Larasati, 2024). Dalam konteks etika narasi komunikasi politik, sila ini mengharuskan setiap narasi yang dibangun oleh politisi, media, maupun aktor publik lainnya untuk mencerminkan komitmen terhadap kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh elemen bangsa, tanpa ada diskriminasi atau ketimpangan sosial. Narasi komunikasi politik yang beretika harus mengedepankan pesan-pesan yang mengutamakan distribusi kekayaan, kesempatan, dan hak-hak dasar bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama bagi kelompok yang paling terpinggirkan.

Penerapan sila kelima dalam komunikasi politik berarti mengutamakan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial, baik di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun dalam hal akses terhadap berbagai sumber daya lainnya (Rachbini & Abdulah, 2020). Dalam hal ini, narasi yang berlandaskan keadilan sosial harus menyoroti permasalahan ketidaksetaraan yang ada di masyarakat, serta menyampaikan solusi yang dapat mengatasi ketimpangan tersebut. Sebagai contoh, narasi yang dibangun oleh politisi atau media harus mengkritisi kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok kaya atau elit, serta mendorong pembaruan kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada rakyat miskin atau kelompok marginal.

Narasi komunikasi politik yang berlandaskan sila kelima juga mengharuskan adanya perhatian khusus terhadap isu-isu sosial yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Komunikasi politik harus memperjuangkan hak-hak individu dan kelompok yang terpinggirkan, seperti perempuan, anak-anak, kelompok disabilitas, dan masyarakat adat, yang sering kali terabaikan dalam pembuatan kebijakan. Politisi dan media memainkan peran krusial dalam membentuk narasi yang memberikan suara kepada kelompok-kelompok tersebut, dengan tujuan memastikan mereka mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan hak-hak dasar lainnya sebagai bagian dari keadilan sosial.

Dalam membangun narasi yang berlandaskan sila kelima Pancasila, penting untuk menghindari politik yang mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang bisa memperburuk ketidakadilan sosial. Komunikasi politik yang etis harus dapat membedakan antara kepentingan politik jangka pendek dan kesejahteraan jangka panjang seluruh rakyat (Al-Jihad, 2018). Sering kali, narasi yang dibangun dalam politik cenderung berfokus pada keuntungan jangka pendek bagi sebagian kecil elit politik atau bisnis. Dengan demikian, sangat penting bagi narasi politik yang beretika untuk mengembangkan kebijakan yang inklusif, yang tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Etika komunikasi politik juga menuntut agar setiap kebijakan yang diusung memiliki dasar keadilan yang jelas dan transparan. Dalam hal ini, narasi yang dibangun

oleh para politisi dan aktor politik lainnya harus mampu menjelaskan dengan gamblang bagaimana suatu kebijakan akan mempengaruhi masyarakat, serta mengapa kebijakan tersebut diambil demi kesejahteraan bersama. Narasi yang mencerminkan prinsip keadilan sosial harus menyertakan alasan yang jelas mengenai bagaimana kebijakan tersebut akan mengurangi ketimpangan sosial dan menciptakan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat. Sebagai hasilnya, transparansi informasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sangatlah krusial dalam komunikasi politik yang beretika.

Pentingnya sila kelima dalam komunikasi politik juga terlihat dalam cara media massa menyampaikan informasi kepada publik. Media memiliki peran besar dalam membentuk persepsi publik tentang isu-isu sosial dan ekonomi. Dalam hal ini, media harus berhati-hati dalam membangun narasi yang berkaitan dengan isu-isu ketidakadilan sosial, dengan memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak menambah kebingungan atau polarisasi sosial. Media yang bertanggung jawab akan menampilkan narasi yang objektif, mendidik, dan menghargai berbagai sudut pandang untuk mendorong terciptanya solusi yang lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat (Revolusi, 2024).

Namun, tantangan utama dalam mengimplementasikan sila kelima dalam narasi komunikasi politik adalah fenomena ketidakadilan struktural yang masih ada di banyak aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Ketimpangan ekonomi yang sangat tajam antara yang kaya dan yang miskin, akses pendidikan yang terbatas di daerah-daerah terpencil, serta kesulitan akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin, adalah beberapa contoh dari ketidakadilan sosial yang masih harus diatasi (Susiana, 2015). Oleh karena itu, komunikasi politik yang beretika harus terus mengangkat isu-isu ini dengan cara yang konstruktif, mendesak adanya perubahan yang nyata, dan tidak terjebak dalam retorika politik yang hanya berfokus pada kepentingan jangka pendek.

Akhirnya, komunikasi politik yang berlandaskan sila kelima Pancasila harus memberikan perhatian yang serius terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan merata. Dalam hal ini, narasi politik yang dibentuk seharusnya tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada distribusi hasil-hasil pembangunan yang merata. Etika dalam narasi komunikasi politik harus mengedepankan kebijakan yang dapat menciptakan lapangan kerja yang luas, mengurangi angka kemiskinan, serta memastikan bahwa setiap rakyat Indonesia dapat menikmati hasil pembangunan secara adil. Sila kelima Pancasila mengharuskan narasi politik yang disampaikan tidak hanya membahas tentang kemajuan, tetapi juga bagaimana setiap warga negara Indonesia dapat merasakan keadilan sosial yang sesungguhnya.

### **Tantangan Dalam Implementasi Etika Narasi Komunikasi Politik**

Meskipun Pancasila menyediakan pedoman yang jelas dalam membangun narasi komunikasi politik yang etis, tantangan dalam implementasinya cukup besar. Salah satu tantangan terbesar adalah dominasi media sosial yang semakin memengaruhi pola komunikasi politik di Indonesia (Zuhdi, 2020). Media sosial, dengan sifatnya yang cepat dan mudah diakses, sering kali menjadi arena bagi penyebaran narasi yang tidak beretika, seperti hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian (Bastian et al., 2018). Hal ini dapat menciptakan polarisasi yang lebih tajam di masyarakat, bertentangan dengan semangat Pancasila yang mengedepankan persatuan dan keharmonisan.

Selain itu, budaya politik yang sering kali pragmatis juga menjadi kendala dalam menciptakan narasi komunikasi politik yang berlandaskan Pancasila (Heryanto, 2018). Dalam beberapa kasus, politisi cenderung mengorbankan nilai-nilai etika demi mencapai tujuan politiknya. Misalnya, dalam upaya untuk menarik simpati atau suara rakyat, narasi yang dibangun terkadang memanfaatkan perbedaan yang ada, alih-alih mengedepankan kesatuan (Lubis & Damanik, 2023). Di sisi lain, media massa yang tidak selalu menjaga independensinya juga turut memperburuk situasi dengan menayangkan berita yang sensasional, yang lebih menonjolkan konflik daripada solusi (Dhinanti et al., 2024).

Penting untuk memperhatikan bahwa penerapan etika dalam narasi komunikasi politik memerlukan peran serta semua pihak, termasuk media, masyarakat, dan lembaga negara. Diperlukan peraturan yang lebih jelas dan pengawasan yang lebih ketat terhadap penyebaran informasi di media massa dan media sosial, agar narasi yang berkembang tetap mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila. Selain itu, pendidikan politik yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila perlu ditingkatkan, agar masyarakat dapat lebih kritis dalam menyaring informasi yang diterima dan mampu berpartisipasi secara aktif dalam menjaga etika dalam komunikasi politik.

### **Peran Media Dalam Membangun Narasi Politik Berlandaskan Pancasila**

Media memegang peran yang sangat krusial dalam membentuk narasi komunikasi politik di Indonesia. Sebagai saluran informasi yang utama bagi masyarakat, media massa dan media sosial harus dapat memainkan peran yang lebih besar dalam menjaga etika komunikasi politik yang berlandaskan Pancasila (Sarihati et al., 2022). Media tidak hanya bertugas untuk menginformasikan, tetapi juga untuk mendidik publik tentang pentingnya berkomunikasi secara etis dan berdasarkan nilai-nilai kebangsaan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan kualitas pemberitaan yang objektif, tidak berpihak, serta menghindari konten yang memecah belah dan merugikan pihak lain.

Selain itu, media harus mengutamakan keberagaman dalam penyajian informasi dan narasi politik. Dengan menghargai perbedaan dan mengedepankan dialog yang konstruktif, media dapat membantu menciptakan iklim politik yang lebih sehat dan harmonis. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam media, baik dalam pemberitaan maupun dalam penyajian opini, harus menjadi bagian integral dari praktek jurnalistik yang etis dan bertanggung jawab (HENDRIYANTO, 2024). Dengan demikian, media dapat menjadi agen penting dalam mewujudkan komunikasi politik yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, yang mendukung terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan bersatu.

## **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

Penelitian ini menekankan bahwa etika dalam narasi komunikasi politik yang berlandaskan pada ideologi Pancasila memiliki peran vital dalam membentuk iklim politik yang sehat dan demokratis di Indonesia. Sebagai ideologi negara, Pancasila memberikan dasar moral dan etis yang mengatur perilaku politik serta komunikasi dalam proses pengambilan keputusan. Setiap sila dalam Pancasila, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial, memberikan pedoman yang jelas bagi para aktor politik dan media untuk menyampaikan narasi yang mendukung tujuan nasional, yaitu tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila pertama Pancasila, "Ketuhanan yang Maha Esa," menggarisbawahi pentingnya menghormati keberagaman agama dalam narasi politik. Dalam komunikasi politik yang beretika, narasi yang dibangun harus mampu menciptakan toleransi antarumat beragama dan menghindari retorika yang dapat menimbulkan perpecahan. Sila kedua hingga keempat, yang menekankan pada kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan, memberikan fondasi untuk membangun narasi politik yang inklusif, demokratis, serta mengedepankan kebijaksanaan dalam pembuatan keputusan politik yang melibatkan semua lapisan masyarakat.

Sila kelima Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," menuntut agar narasi komunikasi politik senantiasa mengedepankan prinsip keadilan dan pemerataan dalam setiap kebijakan yang diambil. Dalam konteks ini, narasi yang dibangun harus mengurangi ketimpangan sosial, ekonomi, dan akses terhadap hak-hak dasar masyarakat. Hal ini berarti bahwa setiap narasi yang dikembangkan oleh aktor politik dan media harus mencerminkan komitmen terhadap pengentasan kemiskinan, pemberdayaan kelompok marginal, serta pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Etika dalam narasi komunikasi politik juga mengharuskan adanya transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab dari semua pihak yang terlibat dalam proses politik. Media massa memegang peran yang sangat penting dalam membangun narasi yang objektif, mendidik, dan memperluas pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, media harus mempertahankan independensinya dan menyampaikan informasi yang tidak hanya akurat, tetapi juga mendukung kebenaran dan keadilan. Demikian pula, politisi harus berkomitmen pada prinsip moral yang mengutamakan kesejahteraan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kelompok.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa etika narasi komunikasi politik yang berlandaskan Pancasila dapat menciptakan komunikasi politik yang lebih damai, adil, dan demokratis di Indonesia. Narasi yang etis berlandaskan ideologi Pancasila tidak hanya berfokus pada kepentingan politik sesaat, tetapi juga pada tujuan jangka panjang untuk membangun negara yang adil, sejahtera, dan bersatu. Oleh karena itu, penting bagi setiap aktor politik untuk selalu menegakkan prinsip-prinsip Pancasila dalam setiap komunikasi politik yang mereka bangun demi kemajuan bangsa dan negara.

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat sejumlah rekomendasi yang dapat diterapkan untuk memperbaiki etika dalam narasi komunikasi politik di Indonesia. Pertama, politisi dan aktor politik harus berpegang pada prinsip-prinsip Pancasila dalam membangun narasi komunikasi politik, menghindari narasi yang memecah belah, serta berfokus pada kepentingan masyarakat luas dan bukan kelompok tertentu. Kedua, media massa perlu berperan aktif dalam menyampaikan informasi yang objektif, transparan, dan mendidik, serta mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam pemberitaan politik. Untuk memperkuat demokrasi, penting pula memperkuat budaya musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan politik, serta memastikan keterlibatan masyarakat dan suara-suara terpinggirkan.

Selain itu, pemerintah dan lembaga negara perlu meningkatkan kesadaran politik masyarakat tentang etika komunikasi politik dengan memperluas program pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan demokrasi. Para akademisi juga diharapkan untuk terus mengembangkan kajian terkait etika narasi komunikasi politik yang berlandaskan Pancasila. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika ini, narasi komunikasi politik di Indonesia dapat menciptakan suasana yang lebih damai, adil, dan berkontribusi pada pembangunan bangsa yang lebih inklusif dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S., Dika, M. F. Z., Yasmin, A., Hanifah, T. P., & Pradana, F. B. A. (2022). Hoax News and Future Threats: A Study of the Constitution, Pancasila, and the Law. *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism*, 1(1), 171–238.
- Al Azis, M. R. (2021). REGULASI DAN SWA-REGULASI INDONESIA DALAM PENYELENGGARAAN MEDIA TERKAIT PERAN MNC GROUP TERHADAP PARTAI PERINDO. *Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(2), 195–205.
- Al-Jihad, R. S. (2018). *Pancasila ideologi dunia: sintesis kapitalisme, sosialisme, dan Islam*. Pustaka Alvabet.
- Ardila, P., Abrar, D. A., & Juniati, D. N. (2024). Dampak Ekonomi Politik Media Terhadap Agenda Setting Pemilu Di Indonesia. *Tuturlogi: Journal of Southeast Asian Communication*, 5(2), 74–82.
- Aryansyah, F., & Fadhli, D. (2024). Moderasi Beragama Untuk Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Indonesia. *AL-Ikhtiar: Jurnal Studi Islam*, 1(3), 212–225.
- Asrori, S. (2017). Politik Kerukunan Di Indonesia; Model Dialog Kelembagaan Antar Umat Beragama. *Young Progressive Muslim. Tangerang Selatan*.
- Aulia, R., & Julita, S. (2024). PERAN PANCASILA DALAM MEWUJUDKAN KEHARMONISAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI INDONESIA. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(5), 2410–2415.
- Badrun, U. (2022). *Sistem Politik Indonesia*. Bumi Aksara.
- Bakry, K., Milia, J., Santoso, R. Y., Asra, S., Hajuan, M. A., Maiwan, M., Sumardi, S., Retta, L. M., Mursyidin, M., & Rahim, E. (2024). *Sistem Politik Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Bastian, C. S., Bajari, A., & Abdullah, A. (2018). Dinamika Aplikasi dan Regulasi Konvergensi Media di Indonesia. *Communication and Information Beyond Boundaries*, 45.
- Bulkhani, B., Santoso, J., Anwar, K., Dirun, M. W. F., & Naim, N. (2024). *JEJAK MODERASI: Sejarah, Implementasi, dan Tantangan di Indonesia dan Peta Dunia*. Akademia Pustaka.
- Chang, W., & Cap, O. F. M. (2018). *Etika dan Etiket Komunikasi: Rahasia, Sadap-Menyadap, Ujaran Kebencian, Hoax*. PT Kanisius.
- Dhinanti, M., Nuranik, D. A., Azka, R., & Nazhif, M. N. (2024). Industrialisasi Media Massa Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Berita: Studi Media Online Tempo Dan Kompas. *Merdeka Indonesia Jurnal International*, 4(2), 405–420.
- Fautanu, I. (2025). *Sejarah Partai Politik di Indonesia*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Hadi, I. P., Wahjudianata, M., & Indrayani, I. I. (2020). Komunikasi massa. In *Komunikasi Massa*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Harefa, D., & Fatolosa Hulu, M. M. (2020). *Demokrasi Pancasila di era kemajemukan*. Pm Publisher.
- HENDRIYANTO, A. (2024). *Jurnalistik 4.0: Mengarungi Gelombang Revolusi Media*. NATA KARYA.
- Heryanto, G. G. (2018a). *Media Komunikasi Politik*. IRCiSoD.
- Heryanto, G. G. (2018b). *Media Komunikasi Politik*. IRCiSoD.
- Heryanto, G. G. (2020). *Realitas komunikasi politik Indonesia kontemporer*. IRCiSoD.

- Hidayat, R., & Suwanto, S. (2020). Membumikan Etika Politik Islam Nabi Muhammad SAW Periode Madinah Dalam Konteks Perpolitikan Indonesia. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 3(2), 124–141.
- Hikmat, M. M. (2020). *Politik Penyiaran Lokal*. JMPD Yayasan Jaringan Masyarakat Peduli Demokrasi.
- Husna, S. K. I., & Najicha, F. U. (2023). Pancasila dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 104–112.
- Iskandar, D. (2018). *Konvergensi Media: Perbauran Ideologi, Politik, dan Etika Jurnalisme*. Penerbit Andi.
- Iswardhana, M. R. (2020). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Merajut Kebinekaan dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri*. PT Kanisius.
- Khatimah, K., Selvia, V., Sugiyarti, A., Maulana, M. G., & Putra, M. L. S. (2024). Pengaruh Media Sosial Terhadap Partisipasi Politik dan Demokrasi di Indonesia. *VOX POPULI*, 7(2), 128–143.
- Kuswandro, W. E. (2023a). *Mosaik Kebangsaan: Membangun Integritas Politik*. Universitas Brawijaya Press.
- Kuswandro, W. E. (2023b). *Mosaik Kebangsaan: Membangun Integritas Politik*. Universitas Brawijaya Press.
- Larasati, K. (2024). *PANCASILA: Dasar Negara dan Ideologi Bangsa*. CV. Intelektual Manifes Media.
- Lubis, A. R. P., & Damanik, A. (2023). ETIKA DAN KEJUJURAN DALAM BERPOLITIK. *Moderate El Siyasi: Jurnal Pemikiran Politik Islam*, 2(2), 57–63.
- Luthfi, K. (2018). *Masyarakat Indonesia dan Tanggung Jawab Moralitas*. Guepedia.
- Mahanum, M. (2021). Tinjauan Kepustakaan. *ALACRITY: Journal of Education*, 1–12.
- Mahardika, A. G. (2018). Menggali nilai-nilai kebangsaan dalam Pancasila sebagai groundnorm Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 267–292.
- Mali, G. T., & Fransiskus, X. (2024). PENGUATAN INTEGRASI BANGSA SEBAGAI UPAYA KONSOLIDASI DEMOKRASI PASCA PEMILU. *Journal of Syntax Literate*, 9(8).
- Muslimin, K. (2019). *Buku ajar komunikasi politik*. Unisnu Press.
- Noor, F. (2016). Perilaku politik pragmatis dalam Kehidupan politik Kontemporer: Kajian atas menyurutnya peran ideologi politik di Era reformasi. *Masyarakat Indonesia*, 40(1), 57–74.
- Novanda, S. I., Sari, Q. H., Cahyani, A. R. P., Rahma, A., & Wibi, M. S. (2024). PERAN PANCASILA DALAM MEMBANGUN SIKAP TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA DI LINGKUNGAN MASYARAKAT. *Lentera Ilmu*, 1–11.
- Novitasari, S., Najicha, F. U., & Hukum, F. H. I. (2023). Pentingnya peran Pancasila bagi generasi muda dalam menghadapi globalisasi. *No. June*, 1–11.
- Nurhaidah, S. N. (n.d.). *KOMUNIKASI POLITIK*.
- Ohoiwutun, Y. A. (2018). *Menalar Kebebasan Beragama Versi Pancasila*.
- Pattipeilohy, L., & Saingo, Y. A. (2023). Pancasila Sebagai Dasar Sistem Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(10).
- Pureklolon, T. P. (2016). *Komunikasi politik*. Gramedia Pustaka Utama.

- Pureklolon, T. T. (2020). Pancasila sebagai etika politik dan hukum negara Indonesia. *Law Review*, 20(1), 71–86.
- Putra, D. K. S. (2019a). *Komunikasi CSR politik: membangun reputasi, etika, dan estetika PR politik*. Prenada Media.
- Putra, D. K. S. (2019b). *Komunikasi CSR politik: membangun reputasi, etika, dan estetika PR politik*. Prenada Media.
- Putri, E. S., Faudzi, M. Y., & Kurniati, K. (2024). Peran Pemimpin dalam Menangani Konflik Keamanan Nasional: Perspektif Etika Politik Islam. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(2), 202–217.
- Rachbini, D. J., & Abdulah, R. (2020). *Musuh Bangsa Bernama Kesenjangan Sosial*. Indef.
- Rahman, M. T. (2020). *Agama dan Politik Identitas dalam Kerangka Sosial*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Rasyid, A. R., Raffli, A., Aditya, A., Rahmadani, S., Hania, Y., & Qiran, Z. F. (2024). Pentingnya Pendidikan Multikultural Dalam Konteks Pancasila Di Masyarakat. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 3648–3655.
- Revolusi, P. R. (2024). PERSEPSI PUBLIK DAN MEDIA SOSIAL DALAM KAMPANYE DIGITAL PILPRES 2024. *NIVEDANA: Jurnal Komunikasi Dan Bahasa*, 5(1), 32–44.
- Samosir, O., Tinambunan, L., & Septiandry, R. (2023). KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN: Tinjauan Filosofis atas Demokrasi dari Sila IV Pancasila. *Seminar Nasional Filsafat Teologi*, 53–63.
- Sarihati, T., Si, M., Luthfie, H. M., Kurniadi, B., & Si, M. (2022a). *Komunikasi Politik, Media Massa dan Opini Publik*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Sarihati, T., Si, M., Luthfie, H. M., Kurniadi, B., & Si, M. (2022b). *Komunikasi Politik, Media Massa dan Opini Publik*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Shahreza, M. (2018). *Proses dan Elemen-Elemen Komunikasi Politik*.
- Sofiyana, M. S., Ahdiyat, M., Iskandar, A. M., Hairunisya, N., Usriyah, L., Dwiantara, L., Ariani, B., Izzati, F. A., Muryani, E., & Gunawan, B. P. (2021). *PANCASILA, Merdeka Belajar dan Kemerdekaan Pendidik*. Unisma Press.
- Suarlin, S., & Fatmawati, F. (2022). *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*. Penerbit Widina.
- Suharyanto, C. E. (2019). Analisis berita hoaks di era post-truth: sebuah review. *Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi*, 10(2), 37–49.
- Susiana, S. (2015). *Pembangunan berkelanjutan: dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan*. P3DI Setjen DPR.
- Tarigan, R. S. (2024). *Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan dan Keseimbangan*. Ruang Berkarya.
- Taufik, C. M., & Suryana, N. (2022). *Media, kebenaran, dan post-truth*.
- Trisiana, A., Gifata, A. O., Fatmawati, A., Maharani, L., & Sari, S. P. K. (2023). *Benturan Nilai Moral Pancasila terhadap Digitalisasi Era Disrupsi*. Unisri Press.
- Trisno, B., Aprillia, O., Latifah, O., Safira, D., & Putri, T. A. (2024). Konsep dan Urgensi Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 3(2), 195–208.
- Umar, H. N. (2021a). *Jihad melawan religious hate speech*. Elex Media Komputindo.
- Umar, H. N. (2021b). *Jihad melawan religious hate speech*. Elex Media Komputindo.

- Utari, E. S., Trilaksono, A., Lesmono, P. D., Ibrahim, M., Huda, M. M., & Widodo, A. W. (2023). *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila (Penjabaran 45 Butir Pancasila)*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Widyaya, I., & Setiawan, W. (2023). ANALISIS FRAMING MODEL ROBERT N. ENTMAN DALAM REPRESENTASI PUBLIK FIGUR POLITIK: EPISODE'DOSA-DOSA ANIES'DI PROGRAM'KICK ANDY'METRO TV. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 3(1), 103–118.
- Wirata, G. (2024). *Etika dalam Kebijakan: Memahami Implikasi Moral dari Keputusan Publik*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Zuchron, D. (2021). *Tunas Pancasila*. Direktorat Sekolah Dasar.
- Zuhdi, M. (2020a). *Komunikasi Politik di Era Virtual: Dinamika Komunikasi dan Media Pasca Pemilu Serentak 2019*. Buku Litera.
- Zuhdi, M. (2020b). *Komunikasi Politik di Era Virtual: Dinamika Komunikasi dan Media Pasca Pemilu Serentak 2019*. Buku Litera.